

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena buruknya watak kewarganegaraan (*civic disposition*) segenap bangsa yang ditandai dengan rendahnya tingkat kejujuran, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kesantunan, telah memasuki berbagai dimensi kehidupan bangsa. Fenomena tersebut dipertegas didalam buku empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh indonesia saat sekarang ini meliputi: krisis akhlak dan moral, pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, Konflik sosial-budaya, penyelewengan hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Tim penyusun buku empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, 2012).

Dengan demikian, permasalahan watak kewarganegaraan segenap bangsa telah menjadi permasalahan nasional yang perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Mempersiapkan segenap bangsa yang memiliki watak kewarganegaraan yang baik sebagaimana yang telah digambarkan diatas, merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat sekarang ini.

Seiring dengan kemajuan peradaban dan kuatnya arus globalisasi, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan kecuali mempersiapkan segenap bangsa yang memiliki watak kewarganegaraan dan karakter yang kuat sehingga tidak terpengaruh oleh nilai-nilai budaya luar yang masuk sebagai bentuk perubahan peradaban dan arus globalisasi dalam kehidupan yang melibatkan seluruh bangsa didunia. Bangsa yang kuat dapat digambarkan dengan bangsa yang memiliki watak kewarganegaraan yang unggul sehingga mampu mengambil sikap dan melaksanakannya secara berkesinambungan sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.

Untuk membentuk warga negara yang memiliki watak kewarganegaraan yang memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan santun, dibutuhkan pendidikan yang bermutu agar mampu untuk mengembangkan pengetahuan warga negara dan melatih keterampilan warga negara dalam melaksanakannya secara

konsisten sehingga menjadi suatu sikap ataupun karakter sebagai warga negara. Dengan demikian, warga negara mampu berperan aktif sesuai dengan nilai-nilai jati diri bangsa dalam proses kehidupan dengan berbagai negara didunia, yang pada akhirnya akan menunjang kemajuan suatu bangsa.

Indonesia merupakan sebuah negara berdaulat yang terlibat secara aktif dalam hubungan dunia global. Fenomena yang digambarkan tentang rendahnya watak kewarganegaraan juga merupakan sumbangan dari hubungan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia, hal ini diperburuk dengan ketidaksiapan warga negara dalam menghadapi arus globalisasi yang masuk, lemahnya jati diri bangsa membuat warga negara terbawa arus globalisasi yang berdampak buruk terhadap watak warga negara.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan bangsa yang memiliki jati diri yang diwujudkan menjadi watak warga negara, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapinya dalam dunia global dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai jati diri bangsa, tanpa terpengaruh sedikitpun oleh nilai-nilai negatif yang masuk melalui hubungan dunia internasional. Menyadari akan hal demikian, para *founding Father* telah merumuskan didalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dengan demikian, berdasarkan rumusan diatas dapat dipahami bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Bangsa yang cerdas tentunya bangsa yang memiliki watak dan karakter yang teguh berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana digambarkan didalam tujuan dan fungsi pendidikan nasional bahwa karakter bangsa yang ingin dibentuk ialah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No. 20 Tahun 2003).

Berbagai langkah-langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan dalam membentuk watak warga negaranya. Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui wahana pendidikan. Jalur pendidikan pada hakikatnya merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah secara formal yang berupa serangkaian kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terdiri atas berbagai tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dan efektif dalam menumbuh dan mengembangkan watak kewarganegaraan, karena setiap disiplin ilmu yang dibelajarkan dalam bentuk mata pelajaran pada hakikatnya tidak terlepas dari pembentukan watak warga negara yang cerdas dan baik.

Pada jenjang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang berfungsi sebagai pengembangan watak kewarganegaraan sesuai dengan fungsi pendidikan tinggi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib dibelajarkan disetiap program studi, membuat kedudukan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang sangat strategis dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 & Keppmendiknas No. 232/U/2000 & No.045/U/2002).

Sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentunya tidak terlepas dari pendidikan nilai yang membantu mahasiswa dalam menumbuh kembangkan kepribadiannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iriyanto (dalam Santoso, 2012, hlm. 1-2) bahwa:

“Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah Suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Upaya untuk membentuk watak kewarganegaraan sangat relevan dengan semangat tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka membentuk warga negara yang baik. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Torney-Purta &

Vermeer (dalam Winarno, 2013, hlm. 177) bahwa “*civic disposition (motivations for behavior and values/attitudes), such as for justice and equality and a sense of personal responsibility*”. Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada hakikatnya merupakan motivasi dalam berperilaku dan nilai-nilai/sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai dan etika yang berlaku.

Lebih lanjut pendapat senada dikemukakan oleh Samsuri (dalam Wibowo, 2015, hlm. 72) yang menyatakan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan upaya pedagogis pembentukan watak warga negara yang baik, yakni memiliki penalaran moral untuk bertindak atau tidak bertindak dalam urusan publik maupun privat”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa warga negara yang baik tercermin dari penalaran moral yang baik dalam bertindak, sehingga target utama pembelajaran PKn pada hakikatnya mengintegrasikan ketiga aspek pendidikan yaitu aspek pemahaman (teoritik), sikap dan tingkah laku (praktik). Rasionalisasi pengintegrasian ketiga aspek tersebut dalam rangka membentuk watak warga negara ialah dimana pemahaman yang baik terhadap suatu materi pembelajaran (nilai-nilai) maka diharapkan diwujudkan dalam sikap dan perilaku sebagai warga negara yang baik atau berbudi pekerti luhur.

Dengan demikian, watak kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan wahana yang sangat strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*), sebagaimana sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dirumuskan oleh *center for Indonesian civic education* (dalam Delianti, 2015, hlm. 9) bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan ialah dengan membentuk watak kewarganegaraan (*civic disposition*) peserta didik sebagai warga negara. Dengan dibekali watak yang baik, sehingga peserta didik dapat bertindak sesuai dengan nilai kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika tindakan ini dilakukan

secara terus menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging dalam dirinya yang pada akhirnya menjadi karakter warga negara sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berdasarkan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis KKNI dikembangkan berdasarkan karakteristik pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Selain karakteristik diatas, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada jenjang pendidikan tinggi dilakukan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi: Papan Tulis, OHP, LCD, dll. (Pedoman Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan MKU, 2014).

Setiap perguruan tinggi tentunya menyediakan media pembelajaran yang berbeda. Dosen sebagai penyelenggara proses pembelajaran harus siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan keadaan yang ada dilapangan, kemungkinan terburuk sekalipun pada saat media pembelajaran tidak disediakan oleh perguruan tinggi, sehingga kebijaksanaan dosen didalam memanfaatkan media pembelajaran sangat diharapkan didalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

Sedangkan penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya menerapkan pendekatan penilaian otentik (*authentic assessment*). Paradigma dari penilaian otentik (*authentic assessment*) harus difungsikan dalam konteks persepsi keotentikan pendidikan secara holistik, yakni dalam konteks interaksi fungsional antara pembelajaran otentik (*authentic instruction*), belajar otentik (*authentic learning*) dan capaian pembelajaran otentik (*authentic achievement*), dan penilaian otentik (*authentic assessment*). (Gulikers, Bastiaen, dan Kirchner, dalam pedoman mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, 2014)

Oleh karena itu, maka penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui berbagai cara dan alat penilaian yang mencakup: test uraian, test perbuatan (unjuk kerja), hasil studi kasus, catatan observasi, penilaian sebaya, penilaian portofolio, penilaian diskusi dan presentasi, penilaian diri, penilaian proses dan hasil proyek belajar sosiometrik, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (Pedoman Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan MKU, 2014).

Fenomena pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dilapangan menunjukkan bahwa komponen pembelajaran yang meliputi: perencanaan, proses pembelajaran dan proses penilaian belum mencerminkan pengintegrasian aspek sikap secara maksimal, dalam rangka untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa agar menjadi warga negara yang memiliki watak pancasilais dan mematuhi konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen, dengan sedikit kurang memperhatikan aspek dari watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa, sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa, pengintegrasian aspek perilaku perlu dilakukan pada saat merumuskan perencanaan, karena perencanaan merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam melaksanakan pembelajaran.

Situasi yang lebih buruk terjadi ketika rumusan perencanaan pembelajaran dipersiapkan bukan sebagai kebutuhan untuk melaksanakan pembelajaran, tetapi melainkan hanya sebagai alat bukti beban kerja dosen. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa dipersiapkan dengan sebuah perencanaan yang maksimal, maka akan berdampak terhadap proses dan hasil pembelajaran yang tidak secara maksimal dalam mengembangkan aspek perilaku ataupun watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

Selain itu, pada tahap proses pembelajaran, materi pembelajaran dijadikan sebagai capaian pembelajaran. Sehingga, proses pembelajaran yang terjadi lebih berorientasi pada pengembangan pengetahuan melalui penguasaan materi-materi pembelajaran, sedangkan aspek yang lainnya seperti aspek keterampilan dan sikap belum mendapatkan perhatian yang serius dari dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, sehingga materi yang diajarkan hanya sebatas hapalan tanpa adanya kompetensi sikap yang dibelajarkan secara komprehensif dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dijadikan oleh mahasiswa sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Banyak faktor yang dijadikan alasan mengapa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan hanya berorientasi pada penguasaan materi seperti keterbatasan waktu yang berdampak terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh

dosen menjadi monoton, karena hanya terfokus kepada penyampaian materi perkuliahan, tanpa ada inovasi-inovasi yang seharusnya dilakukan oleh dosen pada saat perkuliahan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn, agar terwujudnya proses pembelajaran berkualitas yang mampu memotivasi para mahasiswa didalam proses perkuliahan, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya berupa konsep-konsep pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan membentuk sikap secara komprehensif dalam rangka membentuk warga negara yang baik sesuai dengan esensial dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (Nurul Zuriyah, 2011).

Faktor kesibukan juga rentan dijadikan sebagai alasan oleh sebagian dosen untuk tidak menyelenggarakan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara maksimal, seperti: proses pembelajaran yang dilakukan dengan waktu yang sangat sebentar, hanya memberikan tugas kepada mahasiswa tanpa melaksanakan proses perkuliahan, dan bahkan membiarkan mahasiswa belajar sendiri, tanpa ada arahan dan pendampingan yang diberikan oleh dosen tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa.

Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang terjadi dilapangan, kurang menaruh perhatian yang sangat serius dalam upaya meningkatkan watak, sikap, dan kepribadian mahasiswa, karena terlalu dominan dalam mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa. Hal ini dapat diidentifikasi dari proses pembelajaran yang belum mengintegrasikan watak atau sikap kewarganegaraan mahasiswa secara maksimal.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga diidentifikasi bahwa proses pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada dosen (*teacher centered learning*). Pada situasi tersebut, pola komunikasi yang terjadi cenderung satu arah, dan didominasi oleh metode ceramah sehingga membuat situasi perkuliahan menjadi monoton.

Sementara itu, proses penilaian yang dilakukan oleh dosen lebih terfokus kepada penilaian hasil sebagai bentuk pengembangan kognitif atau pengetahuan mahasiswa melalui penilaian UTS dan UAS. Sedangkan penilaian sikap sebagai wujud pengembangan watak kewarganegaraan mahasiswa belum dilakukan secara maksimal, baik itu dalam proses maupun hasil pembelajaran.

Dengan demikian, fenomena menunjukkan bahwa proses penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor belum secara komprehensif dan berkesinambungan dilakukan. Fenomena yang sama juga ditemukan oleh Ningsih, Syarif, dan Sudarman (2013) dalam penelitiannya bahwa teknik penilaian yang digunakan berupa tes yang pada dasarnya merupakan penilaian aspek kognitif dan aspek psikomotorik dan dalam penelitian tersebut juga teridentifikasi bahwa guru tidak melakukan penilaian aspek afektif.

Dari fenomena diatas dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses penilaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada proses penilaian yang terfokus terhadap aspek kognitif. Kondisi ini tentu hanya sampai kepada pembentukan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) peserta didik atau mahasiswa, namun pengetahuan tersebut belum tentu mampu dikonsepsi oleh peserta didik dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, berdampak terhadap rendahnya tingkat watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa yang ditandai dengan rendahnya tingkat kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan diri, kepedulian, kesopanan, kerjasama, rasa ingin tahu, kemauan untuk mendengar, dan masih banyak cerminan-cerminan perilaku lainnya yang menunjukkan rendahnya watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

Dengan demikian, untuk menanggulangi permasalahan diatas, diharapkan dilaksanakannya proses penilaian sikap ketika melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran agar dapat mengidentifikasi perkembangan kepribadian atau sikap mahasiswa. Sehingga, dosen dapat melakukan berbagai bentuk perbaikan dalam proses pembelajaran yang mampu mengembangkan sikap atau kepribadian mahasiswa yang mengarah pada proses internalisasi nilai-nilai moral yang mampu mengonsepsi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam untuk mendeskripsikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasar kurikulum berbasis KKNI dengan sebuah penelitian yang diberi judul “Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum Berbasis KKNI dalam Meningkatkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) Mahasiswa. (Studi Deskriptif di Universitas Riau).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian seperti yang tertuang didalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa?
3. Bagaimanakah proses penilaian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa?
4. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh dosen PKn dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa?
5. Bagaimanakah peningkatan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan **“Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa”**.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum diatas, peneliti merumuskan tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Perencanaan pembelajaran PKn berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.
- b. Pelaksanaan pembelajaran PKn berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.
- c. Proses penilaian pembelajaran PKn berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

- d. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh dosen Pendidikan Kewarganegaraan dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.
- e. Peningkatan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Melalui kajian yang dilakukan secara lebih mendalam agar memperoleh data dan sejumlah informasi guna untuk menjawab berbagai masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan watak mahasiswa di Perguruan Tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menghasilkan temuan yang sangat aktual, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran PKn yang mampu meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yang meliputi:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat memahami pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara utuh yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan Sikap (*disposition*), sehingga mahasiswa mampu mengkonstruksi pengetahuan tersebut menjadi perilaku atau watak dalam proses perkuliahan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Bagi Para dosen

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pembelajaran PKn yang meliputi: perencanaan, proses pembelajaran, dan penilaian berdasarkan kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

c. Bagi pengambil kebijakan dalam ruang lingkup PKn di Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan atau regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan pada kurikulum berbasis KKNI dalam meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mahasiswa.

E. Struktur Organisasi Tesis

Dalam tesis ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab tersebut meliputi: Bab I pendahuluan yang terdiri atas: (a) latar belakang penelitian, (b) rumusan masalah penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, dan (e) struktur organisasi tesis.

Bab II kajian pustaka yang terdiri dari: (a) kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks pendidikan tinggi, (b) kajian mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn), (c) kajian mengenai kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI, (d) kajian tentang watak kewarganegaraan (*civic disposition*), (e) penelitian terdahulu, dan (f) paradigma penelitian.

Sementara itu, Bab III metode penelitian yang terdiri dari: (a) lokasi dan subjek penelitian, (b) pendekatan dan metode penelitian, (c) definisi operasional, (d) penyusunan instrumen, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data. Selanjutnya yaitu Bab IV Temuan dan Pembahasan yang terdiri dari: (a) temuan penelitian, dan (b) pembahasan temuan penelitian. Sedangkan Bab. V kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang terdiri dari: (a). kesimpulan, (b) implikasi, dan (c) rekomendasi.